

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI GORONTALO

Vidi Jesika Tulalo¹, Daisy S.M. Engka², Krest D. Tolosang³^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115. Indonesia

E-mail: vidijesika@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pemerintah bersama seluruh masyarakat berupaya mengelola sumber daya yang tersedia, serta menjalin kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi isu penting karena dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan ketersediaan dan pemerataan distribusi kebutuhan pokok, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di tingkat regional maupun nasional. Ketimpangan ekonomi merujuk pada perbedaan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin, terutama dalam hal pendapatan, tingkat kesejahteraan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, serta tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup. Hasil analisis Indeks Williamson, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama periode 2016–2024 tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 0,39. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ketimpangan dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Williamson tertinggi terjadi pada periode 2020–2024 sebesar 0,41, sedangkan nilai terendah terjadi pada periode 2018–2019 sebesar 0,37.

Kata kunci : Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan.

ABSTRACT

Economic development is a process in which the government, together with the entire community, strives to manage available resources and establish cooperation between local governments and the private sector to create new jobs and stimulate economic growth in a region. Inter-regional development inequality is a critical issue because it can hinder the achievement of development goals, namely increasing the availability and equitable distribution of basic necessities and improving the standard of living of the community at the regional and national levels. Economic inequality refers to significant differences between the rich and the poor, particularly in terms of income, welfare levels, educational background, type of employment, and levels of life satisfaction and happiness. The Williamson Index analysis concluded that the level of development inequality between districts/cities in Gorontalo Province during the 2016–2024 period was relatively low, with an average value of 0.39. However, the study showed a trend of increasing inequality from year to year. The highest Williamson Index value occurred in the 2020–2024 period, at 0.41, while the lowest value occurred in the 2018–2019 period, at 0.37.

Keywords : Population, Gross Regional Domestic Product, Economic Growth, Inequality.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pemerintah bersama seluruh masyarakat berupaya mengelola sumber daya yang tersedia, serta menjalin kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di suatu wilayah (Arsyad, 1999). Dalam proses pembangunan, tujuan utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus pemerataan hasil pembangunan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan pertumbuhan ekonomi justru sering kali memicu ketimpangan antarwilayah (Andhiani, Erfit, & Bhakti, 2018).

Ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi isu penting karena dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan ketersediaan dan pemerataan distribusi kebutuhan pokok, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata di tingkat regional maupun nasional. Ketimpangan ekonomi merujuk pada perbedaan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin, terutama dalam hal pendapatan, tingkat kesejahteraan, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, serta tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup (Adrei dan Craciun, 2014).

Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, maka diharapkan perekonomiannya juga akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, atau indikator-indikator lainnya. Tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi perekonomian melalui

peningkatan kapabilitas penduduk, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan pembangunan disetiap daerah diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi, dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Adapun indikator pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2016 – 2024

Kabupaten /Kota	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
2016	Rp.18.740,00	Rp.19.746,00	Rp.25372,00	Rp.16757,00	Rp.16959,00	Rp.24324,00
2017	Rp.19442,00	Rp.20970,00	Rp.26458,00	Rp.17722,00	Rp.18030,00	Rp.25593,00
2018	Rp.20200,00	Rp.22144,00	Rp.27534,00	Rp.18628,00	Rp.19099,00	Rp.26836,00
2019	Rp.21.607,06	Rp.23.670,02	Rp.29.321,52	Rp.20.119,27	Rp.20.774,47	Rp.28.905,85
2020	Rp.24.027,31	Rp.22.596,03	Rp.31.505,75	Rp.19.439,03	Rp.18.676,80	Rp.31.139,92
2021	Rp.24.204,15	Rp.22.895,36	Rp.31.788,50	Rp.19.623,81	Rp.18.774,44	Rp.31.666,10
2022	Rp.24.623,22	Rp.23.542,01	Rp.32.356,52	Rp.20.158,97	Rp.19.089,11	Rp.32.570,82
2023	Rp.25.381,75	Rp.24.344,90	Rp.33.353,10	Rp.20.800,94	Rp.19.595,77	Rp.33.636,78
2024	Rp.25.948,68	Rp.25.083,00	Rp.34.262,57	Rp.21.406,81	Rp.20.096,05	Rp.34.696,54

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2025

Berdasarkan tabel di atas, PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi pada periode 2016 hingga 2024. PDRB Kabupaten Boalemo di tahun 2016 terus meningkat sampai 2024. Kemudian Kabupaten Gorontalo di tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan namun menurun kembali pada tahun 2021 hingga 2022 dan meningkat kembali dari tahun 2023 hingga 2024. Kabupaten Pohuwato dari tahun 2016 hingga 2024 terus meningkat. Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan namun menurun pada tahun 2020 hingga 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 hingga 2024. Kabupaten Gorontalo tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan namun menurun pada tahun 2020 hingga 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 hingga 2024. Kota Gorontalo dari tahun 2016 hingga 2024 terus meningkat. Provinsi Gorontalo mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang positif dari tahun 2019 hingga 2024, meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Pertumbuhan ini ditunjukkan dari peningkatan PDRB.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo tahun 2016 - 2024?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat daerah pada khususnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal (Widiastuti, 2010).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Lincolin Arsyad, 1997).

2.2 Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdevelopment Region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008 dalam Anwar 2023).

2.3 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

2.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor pendukung karena jumlah penduduk yang besar menyediakan sumber tenaga yang besar pula untuk melaksanakan pembangunan. Faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar hanya akan menambah beban pemerintah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ingli Intan Hadju, Vecky A.J Masinambow, Mauna Th.B Maramis (2021) melakukan penelitian berjudul " Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara " dengan tujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah provinsi sulawesi utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS SULUT). Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dengan angka yang tinggi yaitu 0,5

Vebiola JesikaTerok, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng (2019) dalam penelitian berjudul "Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara" Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sumber daya alam sektor perkebunan terhadap ketimpangan wilayah sulawesi utara dan sulawesi tenggara, menganalisis sumber daya manusia melalui indeks pembangunan manusia, dan mengetahui komparatif ketimpangan wilayah provinsi sulawesi utara dan tenggara. Analisis data berupa analisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan kuadran dengan menggunakan alat analisis Williamson Index dan Analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perkebunan, dan IPM (indeks pembangunan manusia) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dan terdapat perbedaan bahwa sulawesi utara lebih unggul dari sektor perkebunan dan IPM di bandingkan sulawesi tenggara di lihat dari perbedaan jumlah rata-rata sektor perkebunan dan IPM sulawesi utara dan sulawesi tenggara.

Arif Maulana (2019) Meneliti, " Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017" bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010-2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan populasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Indeks

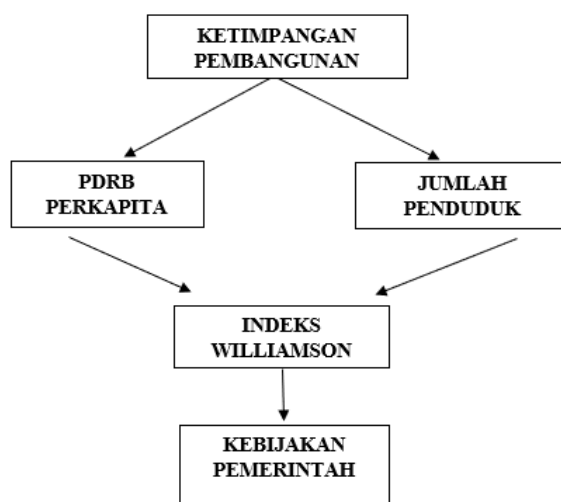
Williamson dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih mengkhawatirkan, ditunjukkan melalui Indeks Williamson menunjukkan tingkat menengah dan tinggi karena berada pada kisaran 0,5. Temuan penting yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah kabupaten yang memiliki ketergantungan besar pada pertambangan batubara berada di kuadran 2 (berpendapatan tinggi tetapi pertumbuhan rendah) dan kuadran 4 (pertumbuhan rendah dan berpendapatan rendah) berdasarkan hasil Tipologi Klassen.

Khairunnisa, Maryunani (2024) dengan penelitian berjudul “*Analysis Of Regional Development Inequality Between Provinces (Case Study Of Java Island 2014-2023)*”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kesenjangan pembangunan di enam (6) provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur untuk tahun 2014-2023. Variabel yang digunakan adalah Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah Indeks Williamson dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan. Sementara itu, FDI, DDI, dan IPM tidak berpengaruh terhadap disparitas pembangunan.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Alur pemikiran teoritis berdasarkan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis



3. METODE PENELITIAN

3.1 Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *Time Series* yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Gorontalo pada periode 2016 - 2024. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana pada pendekatan ini menjabarkan permasalahan serta di analisis berupa angka mulai dari pengumpulan penafisan sampai mendapatkan hasil akhir. Penelitian kuantitatif diperlukan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur, termasuk bahan kuliah, hasil penelitian terdahulu, serta referensi lain yang relevan. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari internet, termasuk situs resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo.

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB juga mencerminkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam wilayah tersebut. Diukur dalam satuan rupiah per tahun.
2. Jumlah penduduk adalah total individu yang menetap dalam suatu wilayah geografis tertentu pada waktu tertentu, baik yang bersifat tetap maupun sementara, termasuk laki-laki dan perempuan dari semua kelompok umur. Diukur dengan satuan orang(jiwa).
3. Ketimpangan merujuk pada perbedaan distribusi sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan), antar individu, rumah tangga, atau wilayah. Diukur dengan Indeks Williamson, yang menggambarkan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah selama satu tahun. Semakin tinggi nilai indeks Williamson, semakin besar ketimpangan yang terjadi.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Indeks Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson, yang merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk disuatu negara. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{y}}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota)

Y = PDRB per kapita (Provinsi Gorontalo)

f_i = Jumlah Penduduk (dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota)

n = Jumlah Penduduk (Provinsi Gorontalo)

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Gorontalo adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Gorontalo adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2024

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2016	0,38	Disparitas Rendah
2017	0,38	Disparitas Rendah
2018	0,37	Disparitas Rendah
2019	0,37	Disparitas Rendah
2020	0,41	Disparitas Rendah
2021	0,41	Disparitas Rendah
2022	0,41	Disparitas Rendah
2023	0,41	Disparitas Rendah
2024	0,41	Disparitas Rendah
Rata-Rata	0,39	Disparitas Rendah

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan angka indeks williamson, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa ketimpangan yang terjadi antara kabupaten/kota di provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang cukup

besar atau melebar itu terjadi pada tahun 2016-2024. Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020-2024 yaitu sebesar 0,41. Indeks Williamson terendah terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar 0,37. Diketahui bahwa rata-rata ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota provinsi Gorontalo selama tahun 2016-2024 sebesar 0,39 dari pengamatan tersebut bisa diketahui bahwa nilai ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di provinsi Gorontalo rendah atau lebih merata. Ukuran ketimpangan jika nilai indeks williamson mendekati 0 artinya di daerah tersebut ketimpangan rendah atau lebih merata dan apabila nilai indeks williamson mendekati 1 maka daerah tersebut terjadi ketimpangan yang sangat tinggi atau melebar.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson pada periode 2016–2024, terlihat bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Peningkatan nilai Indeks Williamson, khususnya pada periode 2020–2024 yang mencapai 0,41, mengindikasikan adanya pelebaran ketimpangan pembangunan wilayah. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya merata dan masih terdapat perbedaan kemampuan antar daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai Indeks Williamson terendah yang terjadi pada periode 2018–2019 sebesar 0,37 menunjukkan bahwa pada masa tersebut pembangunan antar kabupaten/kota relatif lebih merata. Hal ini dapat dikaitkan dengan efektivitas kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan, seperti peningkatan alokasi belanja daerah, penguatan program pembangunan infrastruktur dasar, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi unggulan di daerah tertinggal. Namun, peningkatan kembali nilai indeks pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa kebijakan pemerataan pembangunan tersebut belum berjalan secara konsisten atau menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,39 selama periode 2016–2024 menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah. Meskipun demikian, tren peningkatan ketimpangan menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Ketimpangan yang mulai melebar dapat disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi dan investasi di wilayah tertentu, terutama di daerah perkotaan, sementara wilayah lain mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

Konteks kebijakan pembangunan daerah, hasil ini menegaskan pentingnya penerapan strategi pembangunan yang lebih berimbang dan inklusif. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memperkuat kebijakan afirmatif bagi kabupaten/kota yang relatif tertinggal, melalui peningkatan alokasi dana pembangunan, percepatan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya unggulan masing-masing daerah. Selain itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo.

Meskipun tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo masih tergolong rendah, arah kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu lebih difokuskan pada pemerataan dan keadilan antarwilayah guna mencegah terjadinya ketimpangan yang lebih besar di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama periode 2016–2024 tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 0,39. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ketimpangan dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Williamson tertinggi terjadi pada periode 2020–2024 sebesar 0,41, sedangkan nilai terendah terjadi pada periode 2018–2019 sebesar 0,37.

Peningkatan nilai Indeks Williamson tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan antar wilayah di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan. Perbedaan kemampuan ekonomi antar daerah, konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, serta ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya

ketimpangan antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, meskipun tingkat ketimpangan masih berada pada kategori rendah, tren peningkatan ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- Arsyad Lincolin , 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. (2014). *Peran Gizi dalam Siklus Kehidupan*.
- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85-96.
- Badan Pusat Statistik. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2019-2024.
- Hadju, I. I., Masinambow, V. A., & Maramis, M. T. B. (2021). Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1).
- Maulana, A. (2019). Analisis ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 1-6.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Terok, V. J., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Williamson, J.G. (1965) *Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of Patterns. Economic Development and Cultural*.
- Widiastuti, T. (2010). Kajian Pengembangan Ekonomi dan Wilayah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.